KHUSUS UNTUK ANGGOTA

BULETIN

GINSI JATENG

Edisi Mei 2021 : 936 TAHUN KE - LI

Sekretariat : Jl. Abdul Rahman Saleh No. 226 H Semarang
Telp/Fax : 024 – 76432943 // 024 – 7602781 // WhatsApp : 082 133 919 046
Email : ginsi.jateng@gmail.com // Website : www.ginsijateng.com
Instagram : @ginsijateng // twiter : @ginsijateng

Ginsi Dorong Sosialisasi Perubahan Aturan Impor Baja



BULETIN GINSI JATENG

MEI 2021

NOMOR : 936 TAHUN KE - LI

DAFTAR ISI

- Liputan Khusus : Ginsi Dorong Sosialisasi Perubahan Aturan Impor Baja…….. 1
- Seluruh Pelabuhan di Indonesia Harus Terapkan NLE, Ini Kata DJBC …….... 3
- Pemerintah Mulai Investigasi Lonjakan Impor Ubin Keramik ……..... 4
- Menperin: Program Substitusi Impor Dorong Akselerasi Pertumbuhan Industri …….. 5
- Masih Diminati di Tengah Pandemi Covid-19, Ekspor Produk Minuman Indonesia ke Malaysia Meningkat …….. 8
- Impor April 2021 Diprediksi Tumbuh 35,7%, Manufaktur dan Investasi Pulih? …… 10
- Jaga Aktivitas Industri, Kemenperin Ingin Arus Logistik Lancar …… 11
- Efektivitas Impor Gula Perlu Diikuti Pembenahan Tata Niaga …….. 13
- Peraturan Pemerintah: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.010/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/Pmk.010/2020 Tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, Dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus…….. 15
- Laporan Kegiatan BPD GINSI Jateng bulan Mei 2021 ……..... 23

**** dihimpun dari berbagai sumber*

LIPUTAN KHUSUS :

GINSI DORONG SOSIALISASI PERUBAHAN ATURAN IMPOR BAJA



Gabungan importir nasional seluruh Indonesia (GINSI) mendukung sosialisasi kebijakan Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terhadap perubahan regulasi importasi besi baja , baja paduan dan produk turunannya.

Wakil Ketua Umum BPP GINSI bidang Logistik dan Kepelabuhanan, Erwin Taufan mengatakan, sosialisasi terhadap perubahan regulasi importasi komoditi itu telah dilakukan Kemenperin kepada para importir. Oleh karenanya Ginsi mengapresiasi adanya sinergi yang telah dilakukan antara pemerintah dan para importir GINSI agar aktivitas logistik yang berhubungan dengan importasi komoditi itu bisa berjalan, mengingat besi, baja dan produk turunannya juga diperlukan dalam berbagai proyek pembangunan infrastruktur di tanah air.

Direktorat Jenderal
ILMATE
Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika

"Kita mensupport kebijakan Ditjen ILMATE Kemenperin dalam hal ini. Yang terpenting regulator dan pelaku usaha dapat saling bersinergi. Perubahan peraturan itu bertujuan untuk lebih mempermudah proses pengurusan perizinan importasi. Selain itu sosialisasi aturan ini bisa bermanfaat menambah edukasi para pelaku usaha importasi," ujar Erwin Taufan.

Dia menyampaikan hal itu sehubungan adanya Peraturan Menteri Perindustrian No 4 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian No 1 tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Importasi Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya.

Beleid tersebut telah resmi diundangkan sejak 17 Februari 2021, dan saat ini terus disosialisasikan kepada pelaku usaha tetkait. Taufan menyebutkan, berdasarkan beleid terbaru tersebut, terdapat beberapa pasal perubahan yang diatur antara lain; ketentuan pada Pasal 2 diubah sehingga berbunyi Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir yang telah mendapat Persetujuan Impor.

Adapun Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud bagi perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) maupun pemilik Angka

Pengenal Importir Produsen (API-P) diterbitkan berdasarkan Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal Kemenperin.

Kemudian, ketentuan pada pasal 3 dalam beleid itu juga diubah yakni Pertimbangan dan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat informasi mengenai: nomor pos tarif/HS Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya yang akan diimpor; jumlah, jenis dan spesifikasi Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya yang akan diimpor; pelabuhan muat dan/atau negara asal; pelabuhan tujuan Impor; keterangan verifikasi di pelabuhan muat; dan masa berlaku hanya untuk Pertimbangan Teknis.

Selain itu pada pasal 12 (A) aturuan tersebut Pertimbangan Teknis importasi komoditi tersebut harus mempertimbangan antara lain; kebutuhan Besi atau Baja, Baja Paduan dan/atau Produk Turunannya dari pelaku usaha; realisasi impor dan/atau produksi dari pelaku usaha; dan neraca penyediaan dan permintaan Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya nasional.

Dalam PerMenperin No:4/2021 juga menyebutkan, kebutuhan Baja, Baja Paduan dan/atau Produk Turunannya dari pelaku usaha sebagaimana dipertimbangkan berdasarkan dokumen persyaratan disampaikan dan data industri yang disampaikan melalui sistem informasi industri nasional (SIINas).



"GINSI dapat memahami adanya perubahan dalam beleid itu, karena Pemerintah kini berkomitmen ingin menekan laju importasi komoditi tersebut guna melindungi industri dalam negeri. Namun disisi lain industri dalam negeri juga agar mampu berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas nasionalnya," ucap Taufan.

Dia mengatakan, terhadap adanya perubahan-perubahan regulasi importasi komoditi baja, besi baja dan turunannya tersebut, pihaknya akan turut menyosialisasikannya kepada para importir anggota GINSI yang ada diseluruh Indonesia.

SELURUH PELABUHAN DI INDONESIA HARUS TERAPKAN NLE, INI KATA DJBC



Dirjen Bea dan Cukai Askolani menginginkan implementasi Ekosistem Logistik Nasional (*National Logistic Ecosystem*/NLE) dapat berjalan pada seluruh pelabuhan di Indonesia.

Askolani mengatakan integrasi sistem logistik akan berjalan lancar apabila semua pelabuhan telah mengimplementasikan NLE. Menurutnya, penerapan NLE tersebut akan membuat sistem logistik di pelabuhan makin efisien.

"Melalui program ini, diharapkan seluruh pelabuhan di Indonesia ke depannya terintegrasi dalam sistem sehingga cita-cita untuk menunjukkan Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia dapat terwujud," katanya, Selasa (27/4/2021).

Askolani menuturkan Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional untuk meningkatkan kinerja logistik nasional. Apabila efisiensi logistik membaik, iklim investasi akan meningkat.

Secara umum, implementasi NLE bertujuan meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, serta meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Penerapan NLE ditargetkan mampu menurunkan ongkos logistik dari saat ini 23,5% terhadap PDB, menjadi hanya 17%.

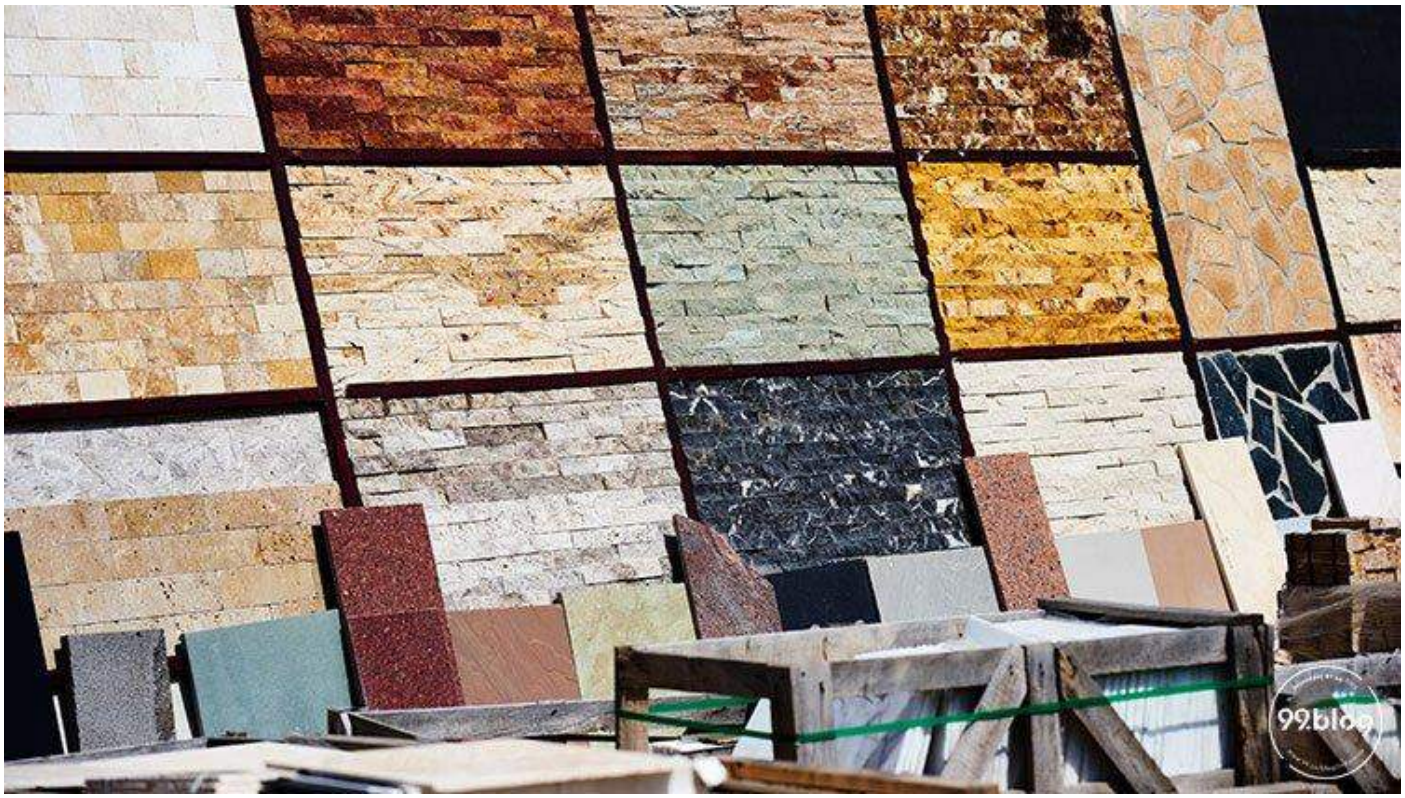
Pengusaha juga cukup sekali memasukkan dokumen untuk izin ekspor-impor karena semua kementerian/lembaga dapat langsung mengaksesnya melalui satu sistem yang terintegrasi. Selain itu, ada joint inspection untuk mempercepat proses pemeriksaan barang sehingga barang bisa segera keluar dari pelabuhan.

Tidak hanya soal penyederhanaan pelayanan, peningkatan kinerja logistik nasional juga menyangkut kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitasi pembayaran antarpelaku usaha logistik, serta penataan tata ruang pelabuhan dan jalur distribusi barang.

Saat ini, NLE telah diterapkan di sejumlah pelabuhan di antaranya seperti Belawan, Tanjung Emas, Tanjung Perak, dan Tanjung Priok. Ke depan, pemerintah berharap semakin banyak pelabuhan di Indonesia yang mengimplementasikan NLE.

"Tentu saja hal ini dapat terwujud dengan sinergi dan kolaborasi dari seluruh kementerian ataupun lembaga terkait," ujar Askolani.

PEMERINTAH MULAI INVESTIGASI LONJAKAN IMPOR UBIN KERAMIK



Jakarta, 5 Mei 2021 – Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) hari ini, Rabu (5/5) memulai penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan/safeguard measures atas lonjakan jumlah impor barang ubin keramik. Penyelidikan tersebut menindaklanjuti permohonan perpanjangan penyelidikan yang diajukan Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI).

"Dari bukti awal permohonan perpanjangan yang diajukan ASAKI, KPPI menemukan adanya lonjakan jumlah impor barang ubin keramik dan kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon. Kerugian serius atau ancaman kerugian serius tersebut terlihat dari beberapa indikator kinerja industri dalam negeri periode 2016–2020, antara lain menurunnya volume penjualan domestik, menurunnya kapasitas terpakai, menurunnya keuntungan, berkurangnya jumlah tenaga kerja, menurunnya pangsa pasar pemohon di pasar domestik, dan meningkatnya volume persediaan akhir atau jumlah barang yang tidak terjual," kata Ketua KPPI, Mardjoko.

Pada 9 April 2021, ASAKI yang menaungi produsen barang ubin keramik mengajukan permohonan perpanjangan kepada KPPI untuk melakukan penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan terhadap impor barang ubin keramik. Sebanyak 12 nomor Harmonized System (HS) delapan digit yang diajukan dalam permohonan tersebut yaitu 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.23.91, 6907.23.92, 6907.23.93, dan 6907.23.94, sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada periode 2016–2020 terjadi peningkatan jumlah impor barang ubin keramik dengan tren sebesar 5,17 persen. Pada 2016, jumlah impornya sebesar 1.069.859 ton, kemudian pada 2017 meningkat menjadi 1.257.123 ton dan meningkat lagi menjadi 1.484.320 ton pada 2018. Walaupun pada 2019 dan 2020 impornya turun sementara menjadi masingmasing 1.337.661 ton dan 1.334.486 ton, namun secara keseluruhan tren volume impor tetap positif.

MENPERIN: PROGRAM SUBSTITUSI IMPOR DORONG AKSELERASI PERTUMBUHAN INDUSTRI



Jakarta: Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan keyakinannya terhadap pertumbuhan industri yang bakal masuk ke teritori positif pada kuartal II-2021. Hal ini seiring dengan meningkatnya aktivitas perekonomian nasional yang juga mulai bergeliat.

"Langkah-langkah mengakselerasi program substitusi impor dan mendorong akselerasi pertumbuhan industri pada tahun 2021 ini akan diimplementasikan ke dalam kebijakan dan program strategis untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2021," ujar Agus dalam siaran persnya, Rabu, 5 Mei 2021.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah meluncurkan program substitusi impor 35 persen pada 2022. Nilai substitusi impor yang ditargetkan adalah sebesar Rp152,83 triliun atau 35 persen dari potensi impor 2019 yang sebesar Rp434 triliun.

"Langkah-langkah untuk penurunan impor dilakukan melalui substitusi impor dan peningkatan utilisasi sektor industri," paparnya.

Adapun kebijakan dan program strategis yang akan diimplementasikan Kemenperin pada tahun ini, di antaranya program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Melalui program ini, diharapkan dapat meningkatkan investasi dan menutup pohon-pohon industri yang masih diisi oleh barang-barang impor.

"Kami juga memfasilitasi pemberian sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), yang akan mempermudah Industri Kecil Menengah (IKM) memasukkan produk-produknya ke dalam e-katalog, sehingga akan memperluas pasar mereka," harapnya.

Kemudian, menerapkan neraca komoditas sebagai salah satu implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Langkah tersebut untuk memastikan bahwa industri bisa dapat bahan baku sesuai yang diinginkan.

"Jadi untuk mendorong industri dalam negeri, kebutuhan bahan baku bisa diproduksi di dalam negeri," jelas Agus.

Kebijakan lainnya, yakni penurunan harga gas, program hilirisasi mineral, pengembangan kawasan industri, program pengembangan Digital Capability Center, program pengembangan vokasi industri,

program pengembangan IKM, hingga program Bangga Buatan Indonesia.

Di sisi lain, Agus mengemukakan bahwa sektor industri pengolahan nonmigas masih menjadi motor penggerak roda perekonomian nasional pada kuartal I-2021. Terlihat dari kontribusinya terhadap PDB nasional sebesar 17,91 persen, lebih tinggi dibandingkan periode sama 2020 yang tercatat sebesar 17,86 persen.



Selain itu, tercatat nilai ekspor sektor industri pada Januari-Maret 2021 sebesar USD38,95 miliar dan menghasilkan neraca surplus sebesar USD3,69 miliar. Tiga industri yang memberikan nilai terbesar, yakni industri makanan sebesar USD9,68 miliar, industri logam dasar sebesar USD5,86 miliar, serta industri bahan kimia, farmasi, dan obat tradisional sebesar USD4,30 miliar.

Berikutnya, nilai investasi sektor industri pada periode Januari-Maret 2021 sebesar Rp88,3 triliun, naik 37,97 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai investasi terbesar diberikan oleh industri logam, mesin dan elektronik sebesar Rp31,2 triliun, industri makanan sebesar Rp21,8 triliun, serta industri kimia dan farmasi sebesar Rp9,4 triliun.

Jurus Kemenperin Akselerasi Substitusi Impor 35 Persen

Kementerian Perindustrian telah meluncurkan program substitusi impor 35% pada tahun 2022. Langkah strategis ini guna meningkatkan produktivitas dan daya saing industri di tanah air sehingga mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional.

"Nilai subtitusi impor yang ditargetkan sebesar Rp152, 83 triliun atau 35% dari potensi impor tahun 2019 yang mencapai Rp434 triliun," kata Inspektur.

Jenderal Kemenperin, Masrokhan saat mewakili Menteri Perindustrian pada webinar tentang "Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri", Kamis (29/4).

Irjen Kemenperin menyebutkan, upaya-upaya yang akan dilakukan Kemenperin dalam mengakselerasi penurunan impor sekaligus merupakan langkah untuk meningkatkan utilisasi di sektor industri. Salah satunya adalah pelaksanaan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). "Program ini dinilai dapat memberikan kesempatan kepada industri-industri di Indonesia untuk tumbuh," ujarnya.

Apalagi, potensi dari APBN mencapai Rp607 triliun, yang tediri atas Belanja Barang senilai Rp357,4 triliun dan Belanja Modal Rp250,3 triliun. "Sejak Timnas P3DN diluncurkan pada tahun 2018, Kemenperin telah mengeluarkan sertifikat TKDN untuk lebih dari 10.000 produk. Tentunya ke depan kami akan akselerasi ini," imbuhnya.

Kebijakan lainnya yang bisa menjadi pengungkit, yakni penurunan harga gas industri. Pada tahun 2020, terdapat 176 perusahaan dari tujuh sektor tersebut yang mendapat fasilitas tersebut. "Dengan adanya fasilitasi ini, beberapa perusahaan mulai merencanakan untuk memperbarui teknologi agar dapat memanfaatkan gas bumi dengan lebih efisien," ungkap Masrokhan.



Selain itu, terkait implementasi kebijakan harga gas industri tersebut, di Jawa bagian barat telah tercover 100%, sedangkan Jawa bagian timur baru 82%. Sementara itu, di wilayah Sumatera bagian utara dan Sumatera sekitar 20-30%. "Kami menargetkan agar sektor penerima kebijakan penurunan harga gas ini dapat bertambah dan coverage-nya makin meningkat," tegasnya.

Masrokhan menyampaikan, upaya hilirisasi industri juga ditempuh lewat pengembangan industri smelter, seperti smelter nikel, nikel kobalt, alumunium, tembaga dan besi baja. Saat ini, secara total Indonesia sudah punya sebanyak 30 smelter yang beroperasi, sedangkan yang tahap konstruksi sekitar 20 smelter, dan dalam tahap feasibility study ada sembilan smelter.

"Seluruhnya kami dorong demi penguatan hilirasi industri pertambangan dan memperkokoh struktur industri," ujarnya. Implikasi dari kebijakan ini, di antaranya adalah sektor industri logam dasar pada tahun 2020 tumbuh 5,87%, ekspornya ikut tumbuh hingga 30%, dan menyumbang devisa negara sebesar USD22 Miliar.



"Oleh karena itu, pada tahun 2021 kami akan lanjutkan tren positif ini, apalagi rencana hilirisasi industri ini akan juga memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen baterai untuk kendaraan listrik," tandasnya.

Kebijakan berikutnya, Kemenperin terus terlibat aktif dalam program Bangga Buatan Indonesia. Manfaatnya antara lain menciptakan nilai tambah bagi sektor industri kecil menengah (IKM), meningkatkan permintaan terhadap produk IKM, dan meningkatkan jumlah IKM yang on-boarding.

"Pada bulan Mei 2021, Kemenperin akan meluncurkan Festival Joglosemar yang menampilkan para pelaku IKM terbaik dari daerah Jogja, Solo, dan Semarang. Acara tersebut akan diisi dengan webinar, bimbingan teknis dan pelatihan bagi IKM," pungkasnya.

MASIH DIMINATI DI TENGAH PANDEMI COVID-19, EKSPOR PRODUK MINUMAN INDONESIA KE MALAYSIA MENINGKAT



Nilai ekspor produk minuman termasuk minuman energi ke Malaysia mengalami kenaikan selama tahun 2020 dan awal tahun 2021. Produk minuman dari Indonesia masih mendapatkan permintaan yang cukup tinggi bagi masyarakat Malaysia di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Untuk itu, Indonesia harus dapat memanfaatkan peluang ini sebagai upaya meningkatkan ekspor produk minuman khususnya ke Malaysia. Pada periode Januari–Februari 2021, nilai ekspor minuman Indonesia ke Malaysia mencapai USD 939 ribu atau meningkat hampir 80 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Sedangkan pada 2020, nilai ekspor produk minuman mencapai USD 3,81 juta atau meningkat 6,17 persen dibandingkan tahun 2019.

"Di era pandemi, permintaan minuman justru mengalami peningkatan. Konsumsi masyarakat Malaysia terhadap produk minuman Indonesia sangat tinggi terutama tahun 2020. Padahal Malaysia menerapkan pembatasan pergerakan secara ketat selama pandemi," ujar Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Didi Sumedi pada kesempatan terpisah.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono menyampaikan, peluang ekspor produk minuman Indonesia ke Malaysia masih terbuka lebar. Salah satunya dengan adanya penandatanganan kerja sama sponsorship antara Kalbe Malaysia Sdn Bhd dengan Fotball Association of Malaysia (FAM) yang dilaksanakan pada hari ini, Rabu (5/5).

"Dengan kerja sama ini, Kalbe Farma akan memberikan minuman berenergi ternama dari Indonesia sebagai bentuk sponsorship dalam penyelenggaraan liga amatir yang berada di bawah tanggung jawab FAM," imbuh Hermono.

Menurut Atase Perdagangan Kuala Lumpur Deden Muhammad, sponsorship ini sangat baik dilakukan sebagai bentuk promosi dalam mengenalkan produk Indonesia kepada berbagai lapisan masyarakat, termasuk diaspora yang berada di Malaysia.

"Kerja sama sponsorship ini merupakan langkah penting dalam memanfaatkan peluang tersebut. Melalui kerja sama sponsorship ini, diharapkan dapat mendorong ekspor produk minuman Indonesia ke Malaysia," kata Deden.

Consumer Head Kalbe Malaysia Asep Dasuki menyampaikan, kerja sama Kalbe dan FAM merupakan kesempatan yang sangat baik untuk mendorong eskpor produk minuman energi di pasar Malaysia.

"Selain kesempatan untuk mempromosikan gaya hidup sehat melalui sepak bola, kerja sama Kalbe dengan FAM merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan ekspor produk minuman energi. Pada 2020, nilai ekspor minuman energi dari kalbe meningkat 8 persen dibandingkan tahun 2019. Peningkatan tersebut cukup baik di tengah kondisi pandemi saat ini," tutup Asep.

Pada periode bulan Januari–Februari 2021, nilai ekspor Indonesia ke Malaysia mencapai USD 1,491 miliar atau meningkat 32,56 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020.

Sedangkan impor Indonesia dari Malaysia tercatat sebesar USD 909,36 juta. Dengan demikian, Indonesia mencatatkan surplus perdagangan sebesar USD 581,64 juta.

E-commerce Bantu UMKM Solo Ekspor Kebaya ke Malaysia hingga Thailand



Keberadaan e-commerce di Indonesia turut meningkatkan peluang ekspor bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Solo. Hal ini pun dirasakan oleh salah satu pengusaha kebaya asal Solo, Herawan, yang kini telah dapat memasarkan produknya hingga lima negara yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam.

Pemilik toko online kebayamumer di Shopee ini mengaku sejak awal bergabung dengan Program Ekspor Shopee, dirinya merasakan dampak yang signifikan. Hingga kini, Herawan terus mendapatkan pesanan ekspor. Bahkan, sekitar 40% penjualan tokonya berasal dari ekspor, sedangkan 60% berasal dari lokal.

"Sudah 3 tahun saya bergabung dengan Shopee dan saya merasa senang karena sangat membantu toko offline saya. Di saat pandemi seperti ini, banyak konsumen yang beralih berbelanja secara online. Terlebih lagi, program-program di Shopee menarik banyak konsumen, khususnya Gratis Ongkir Xtra." ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (21/4/2021).

Lebih lanjut Herawan menjelaskan sejak berpartisipasi dalam Program Ekspor Shopee, dirinya mendapat dukungan dan pendampingan dari Shopee. Hal inilah juga yang membuat penjualan meningkat dengan signifikan.

Soal penjualan ekspor, Herawan menyebut saat ini mayoritas penjualan ekspor Kebayamumer datang dari Malaysia dan Thailand. Meskipun demikian, pria yang tinggal di wilayah Laweyan, Solo ini akan tetap terpacu mengembangkan produknya dengan menjaga kualitas produk agar lebih dapat bersaing di pasar ekspor.

Ke depan, Herawan berencana untuk memodifikasi produk dengan desain baru yang lebih dapat diterima dan sesuai dengan preferensi konsumen luar negeri. Salah satunya membuat produk dengan desain melayu untuk konsumen Malaysia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Shopee Handhika Jahja mengungkapan UMKM Solo memang memiliki potensi di pasar ekspor. Bersama Pemkot Solo, Shopee akan menggelar program UMKM Solo Go Ekspor pada 23-24 April 2021. Program tersebut nantinya akan memberikan berbagai pelatihan UMKM, bantuan pendanaan, hingga akses ke pasar ekspor di Asia Tenggara bagi UMKM Solo.

"Data kami mencatat ada 40.000 UMKM Solo yang terdaftar dan 5.000 di antaranya memiliki toko ekspor aktif. Angka ini tentu masih bisa terus ditingkatkan melalui program yang akan kami jalankan bersama Pemerintah Kota Solo," pungkasnya.

IMPOR APRIL 2021 DIPREDIKSI TUMBUH 35,7 PERSEN, MANUFAKTUR DAN INVESTASI PULIH?



Kepala Ekonom Bank Danamon Wisnu Wardhana memperkirakan kinerja impor Indonesia pada April 2021 akan tumbuh dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

"Kami perkirakan impor akan tumbuh 35,7 persen pada April 2021," katanya kepada Bisnis, Jumat, 13 Mei 2021.

Wisnu menjelaskan, pertumbuhan kinerja impor tersebut didukung oleh beberapa indikator. Salah satunya yaitu indeks keyakinan konsumen yang telah mencapai level optimistis, untuk pertama kalinya sejak pandemi Covid-19 merebak di Indonesia.

Selain itu, indikator permintaan domestik dan mobilitas masyarakat juga tercatat mengalami peningkatan pada periode April 2021.

Sementara itu, kinerja impor secara bulanan diperkirakan hanya akan mengalami pertumbuhan sebesar 1,4 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor pada Maret 2021 sebesar US$16,79 miliar, naik sebesar 26,55 persen secara bulanan dan 25,73 persen secara tahunan.

Kenaikan impor secara bulanan didorong adanya kenaikan impor migas dan nonmigas, masing-masing sebesar 74,74 persen dan 21,30 persen.

Sementara secara tahunan, impor migas mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu sebesar 41,87 persen dan impor nonmigas naik sebesar 23,52 persen.

BPS menyebut, peningkatan impor yang positif pada Maret 2021 tersebut telah menunjukkan adanya geliat sektor manufaktur dan investasi yang mulai pulih kembali

JAGA AKTIVITAS INDUSTRI, KEMENPERIN INGIN ARUS LOGISTIK LANCAR



Kementerian Perindustrian bertekad untuk terus menjaga aktivitas sektor industri manufaktur agar tetap berproduksi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah masa pandemi Covid-19. Berbagai kebijakan telah diterbitkan, antara lain penerapan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI), dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin.

"Industri merupakan motor penggerak bagi perekonomian Indonesia. Produktivitasnya akan terus dipacu untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor sehingga mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (10/5).

Di samping itu, Kemenperin juga mendorong kegiatan sektor industri dapat berjalan lancar, termasuk dalam aspek arus logistiknya. Hal ini untuk mengantisipasi dampak penyekatan sejumlah jalan akibat peniadaan mudik tahun ini sebagai upaya pencegahan dan memutus rantai peyebaran Covid-19.

"Kami telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, seperti Polri, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, dan asosiasi industri agar dapat menghindari dan meminimalkan kemacetan sehingga aliran logistik sektor industri berjalan baik dan tidak menghambat perjalanan pekerja menuju beberapa kawasan industri," kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Eko S.A. Cahyanto.

Dirjen KPAII menyebutkan, sejumlah usulan yang disampaikan Kemenperin, antara lain dilakukannya penyaringan pemeriksaan atau pemisahan jalur kendaraan umum dan pengangkut logistik. Berikutnya, untuk truk pengangkut logistik dan bis pekerja, dapat dikecualikan dalam pemeriksaan dokumen.

"Kami juga memberikan opsi untuk memindahkan lokasi penyekatan untuk lebih mundur ke wilayah Cikampek atau perbatasan

Karawang dan Purwakarta," ungkapnya. Sebab, pada 6 Mei lalu, penyekatan di KM 31 dan KM 47 ruas tol Jakarta-Cikampek membuat kemacetan yang cukup panjang.

Di samping itu, dalam upaya meningkatkan pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan industri, Kemenperin mendorong setiap industri untuk lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan serta aktif melaporkan IOMKI.

"Pengelola kawasan industri didorong untuk mengingatkan tenant di dalamnya agar lebih rajin dalam melaporkan IOMKI dan mengawasi pelaksanaan larangan mudik bagi pekerja di lingkungan kawasan industri," papar Eko.

Bahkan, Kemenperin akan melakukan monitoring penyekatan jalan hingga 18 Mei 2021 melalui laporan dari pengelola kawasan industri. "Pengelola kawasan industri melaporkan keadaan di lokasi penyekatan secara langsung melalui format pelaporan yang telah disusun," imbuhnya.

Selain itu, Kemenperin mendorong program vaksinasi Gotong Royong yang akan dilaksanakan pada pertengahan Mei 2021, sehingga perlu dipastikan setiap pekerja industri dalam kondisi sehat terutama setelah Lebaran. "Dimohon peran para pengelola kawasan industri untuk mewaspadai potensi Covid-19 dari arus balik serta persiapan jika dilakukan penyekatan yang sama untuk arus balik mudik," tegas Eko.

Dirjen KPAII optimistis apabila langkah-langkah tersebut dijalankan dengan baik, kinerja industri yang kini tengah bangkit dapat terjaga dan diharapkan bisa lebih meningkat. Sebab, aktivitas sektor industri selama ini memberikan efek yang luas bagi perekonomian nasional, di antaranya adalah penerimaan devisa dan penyerapan tenaga kerja.

Kinerja gemilang sektor industri kembali ditunjukkan melalui catatan Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang mampu menembus level 54,6 pada bulan April, sesuai yang dirilis oleh IHS Markit. Capaian tersebut naik signifikan dibanding bulan Maret yang berada di posisi 53,2. Apabila PMI di atas angka 50, mencerminkan sektor industri sedang ekspansif.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Januari-Maret 2021, nilai ekspor industri pengolahan menembus hingga USD38,96 miliar atau tumbuh 18,06% dibanding periode yang sama di tahun lalu. Sektor manufaktur ini menjadi kontributor terbesar pada nilai ekspor nasional, yakni mencapai 79,66%.

EFEKTIVITAS IMPOR GULA PERLU DIIKUTI PEMBENAHAN TATA NIAGA



JAKARTA -- Impor gula terus dikritik karena tidak efektif untuk menurunkan harga gula di Tanah Air. Untuk meningkatkan efektivitasnya, impor gula perlu diikuti pembenahan tata niaga.

Impor gula tidak bisa dilihat sebagai satu-satunya alat dalam mengatasi permasalahan gula di Indonesia. Tanpa adanya pembenahan tata niaga gula di dalam negeri, impor hanya akan bertindak sebagai solusi sementara yang efektivitasnya terus dipertanyakan.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Arumdriya Murwani, menuturkan, terdapat faktor-faktor lain yang juga berkontribusi pada rendahnya produksi gula dalam negeri, seperti laju konversi lahan pertanian dan rantai distribusi yang panjang, juga berperan dalam mengurangi efektivitas impor gula sebagai alat untuk stabilisasi harga.

"Pemerintah perlu terus meningkatkan upaya untuk memperbaiki tata niaga gula, baik secara on-farm dan off-farm. Selain revitalisasi mesin dan pabrik gula, kebijakan-kebijakan yang dibuat juga perlu fokus pada pemenuhan kebutuhan gula di dalam negeri. Regulasi impor perlu dibuat sesederhana mungkin dan memungkinkan impor dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi dalam membaca kebutuhan pasar," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/5).

Data United States Department of Agriculture (USDA) 2020 menunjukkan, Indonesia memproduksi 29,3 juta ton tebu yang digiling menjadi 2,1 juta ton gula untuk konsumsi selama periode Mei 2020 - Mei 2021. Indonesia harus mengimpor sekitar 5,2 juta ton gula untuk memenuhi konsumsi domestik yang mencapai 7,4 juta ton.

Terus bertambahnya jumlah konsumsi gula di Tanah Air, yang salah satunya disebabkan laju populasi penduduk, tidak bisa diimbangi kemampuan petani tebu dan pabrik gula. Salah satu penyebab rendahnya produksi gula di Indonesia

adalah umur fasilitas produksi gula tebu yang sudah tua.

Data USDA 2020 menunjukkan, sebanyak 40 dari 56 pabrik gula yang ada di Indonesia berusia lebih dari 100 tahun. Pemerintah sudah merespons masalah ini melalui revitalisasi pabrik gula yang sudah ada dan membangun pabrik-pabrik baru.

Masalah lain penyebab rendahnya produksi gula adalah laju konversi lahan pertanian. USDA juga menyebut, sebanyak 56 persen area panen tebu yang ada di Indonesia berlokasi di Jawa. Menurut studi Rondhi et al., (2018), laju konversi lahan pertanian secara umum di Indonesia adalah 187,720 ha per tahun.

Angka ini diperkirakan dapat terus meningkat mengingat pembangunan pusat kawasan industri di Jawa Tengah. Pengembangan infrastruktur besar-besaran yang terjadi di Pulau Jawa pun berpotensi menurunkan luas area panen dan jumlah panen tebu setiap tahunnya.

Arum menambahkan, ongkos logistik yang tinggi juga perlu menjadi perhatian. Data BPS 2019 menunjukkan, rata-rata margin perdagangan dan pengangkutan di Indonesia adalah sebesar 33.18 persen dan Maluku merupakan provinsi dengan margin perdagangan dan pengangkutan tertinggi, yaitu sebesar 57.49 persen.

Tingginya margin perdagangan dan pengangkutan disebabkan oleh panjangnya rantai perdagangan bagi provinsi yang tidak menghasilkan gula sendiri. Sebagai contoh, Maluku harus mengimpor mayoritas gulanya dari Jawa Timur (99,96 persen) dan Nusa Tenggara Barat (0,04 persen).

Dari luar provinsi, gula harus melalui tiga mata rantai sebelum gula sampai di tangan konsumen, yaitu distributor, agen dan pedagang eceran. Biaya logistik yang tinggi sekaligus panjangnya rantai perdagangan membuat harga gula di tingkat konsumen mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

Tantangan terakhir dan cukup fundamental adalah belum tersedianya satu data tebu dan gula yang akurat. Sebagaimana permasalahan yang melanda komoditas lain, data akurat yang dapat dijadikan acuan masih relatif sulit ditemukan di Indonesia.

Khusus untuk gula, data yang dapat diakses oleh publik berbeda-beda antara satu instansi dengan instansi lain. Kalau data yang tidak akurat dijadikan dasar pengambilan kebijakan, lanjut Arum, maka kebijakan yang dihasilkan tidak akan mampu merespons permasalahan yang ada.

"Pemerintah, terutama Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, perlu merumuskan metode pengumpulan data dan meningkatkan transparansi mengenai *database* yang dipakai untuk merumuskan kebijakan. Hal ini harus dilakukan agar kebijakan yang diambil dapat mengilustrasikan realitas yang ada di lapangan dan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih efektif," ujarnya.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33/PMK.010/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 237/PMK.010/2020 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN, DAN CUKAI PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Menimbang :

a. bahwa ketentuan mengenai perlakuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kawasan Ekonomi Khusus telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237 /PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus;
b. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dan menyelaraskan ketentuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, perlu melakukan penyesuaian terhadap perlakuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
12. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga *National Single Window* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1825);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1685);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 237/PMK.010/2020 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN, DAN CUKAI PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1685), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4 sampai dengan angka 7, angka 13, angka 19, angka 20, angka 21, angka 23 Pasal 1 diubah, angka 22 dan angka 25 dihapus, di antara angka 24 dan angka 25 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 24a, dan di antara angka 26 dan angka 27 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 26a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik. Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
2. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
3. Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.
4. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi atau lebih dari satu provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK.
5. Administrator KEK adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan perizinan berusaha, perizinan lainnya, pelayanan, dan pengawasan di KEK.
6. Badan Usaha adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha KEK
7. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha di KEK.
8. Pembangunan adalah pendirian kawasan, perusahaan, atau pabrik baru untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.
9. Pengembangan adalah pengembangan kawasan, perusahaan, atau pabrik yang telah ada, meliputi penambahan, modemisasi, rehabilitasi, dan/atau

restrukturisasi dari alat-alat produksi termasuk mesin untuk tujuan peningkatan jumlah, jenis, dan/atau kualitas hasil produksi barang dan/atau jasa.

10. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
11. Kegiatan Utama adalah bidang usaha beserta rantai produksinya yang menjadi fokus kegiatan KEK dan ditetapkan oleh Dewan Nasional.
12. Kegiatan Lainnya adalah bidang usaha di luar Kegiatan Utama di KEK.
13. Kegiatan Usaha Utama adalah bidang usaha dan jenis produksi sebagaimana tercantum dalam izin prinsip, izin investasi, pendaftaran penanaman modal, atau Perizinan Berusaha pada saat pengajuan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan atau fasilitas Pajak Penghasilan.
14. Penanaman Modal adalah investasi berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama, baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
16. Aktiva Tetap Berwujud adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun dan/atau dirakit lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan atau dipindahtangankan.
17. Aktiva Tak Berwujud adalah aktiva tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang digunakan dalam operasi perusahaan, dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan atau dipindahtangankan.
18. Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat PDRI adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22.
19. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah kawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
20. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain Kawasan Bebas, Tempat Penimbunan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus
21. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya
22. Dihapus.
23. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disebut OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
24. Barang Modal adalah harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, termasuk pengeluaran berkaitan dengan perolehan barang modal yang dikapitalisasi ke dalam harga perolehan barang modal tersebut.

    24a. Barang Konsumsi adalah barang/bahan baku habis pakai yang digunakan oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha jasa untuk kegiatan yang menghasilkan jasa di KEK
25. Dihapus
26. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

    26a. Sistem Aplikasi KEK adalah sistem elektronik yang terdiri dari Sistem Indonesia National Single Window, Sistem Komputer Pelayanan Bea dan Cukai, dan aplikasi lain yang mengotomasikan proses bisnis kegiatan pemasukan, perpindahan, dan pengeluaran barang ke dan dari KEK
27. Sistem Indonesia National Single Window yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
28. Saat Mulai Berproduksi Komersial adalah saat pertama kali hasil produksi atau jasa dari Kegiatan Usaha Utama dijual atau diserahkan, atau digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut.
29. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
30. Pemberitahuan Pabean Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat PPKEK adalah

pemberitahuan pabean untuk kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KEK.

31. Pemberitahuan Jasa Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat PJKEK adalah pemberitahuan yang digunakan dalam pemanfaatan jasa ke dan dari KEK.
32. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
33. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
34. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Terhadap Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK diberikan fasilitas berupa:
    a. Pajak Penghasilan;
    b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
    c. bea masuk dan PDRI; dan/atau
    d. cukai.
(2) Bidang usaha yang memperoleh fasilitas di KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. bidang usaha yang merupakan Kegiatan Utama KEK; dan
    b. bidang usaha yang merupakan Kegiatan Lainnya di luar Kegiatan Utama KEK.
(3) Untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    a. merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, baik pusat maupun cabang, yang melakukan kegiatan usaha KEK;
    b. memiliki penetapan sebagai Badan Usaha untuk membangun dan/atau mengelola KEK dari Dewan Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya;
    c. mempunyai batas yang jelas sesuai dengan tahapan Pembangunan KEK; dan
    d. memiliki Perizinan Berusaha.
(4) Untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus memenuhi syarat umum sebagai berikut:
    a. merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, baik pusat maupun cabang, yang melakukan kegiatan usaha di KEK; dan
    b. memiliki Perizinan Berusaha.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, Badan Usaha· atau Pelaku Usaha di KEK dalam kegiatan pemasukan, perpindahan dan pengeluaran barang wajib melalui Sistem Aplikasi KEK.
(2) Untuk mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk, Badan Usaha atau Pelaku Usaha wajib mendayagunakan sistem persediaan berbasis teknologi informasi (IT inventory).
(3) Sistem Aplikasi KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
    a. dokumen tunggal (single document);
    b. melalui sistem elektronik;
    c. integrasi dengan sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT inventory);
    d. standardisasi dan pertukaran data SINSW dengan Sistem Komputer Pelayanan Bea dan Cukai; dan integrasi SINSW dengan sistem perpajakan.
(4) Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK yang telah menyelesaikan masa Pembangunan atau Pengembangan, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Saat Mulai Berproduksi Komersial.

4. Ketentuan ayat (5) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Pemberian fasilitas Pajak Penghasilan di KEK diputuskan oleh Menteri.
(2) Penetapan keputusan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan di KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) atau pengajuan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan secara luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(3) Keputusan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan di KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk dan atas nama Menteri.
(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan di KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) atau Pasal 10 diterima secara lengkap dan benar.
(5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:

a. nomor dan tanggal keputusan mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan di KEK;
b. identitas Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang meliputi:
    1. nama Badan Usaha atau Pelaku Usaha;
    2. Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha atau Pelaku Usaha; dan
    3. alamat Badan Usaha atau Pelaku Usaha;
c. persentase besaran dan jangka waktu fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di KEK;
d. ketentuan mengenai pembebasan dari pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan;
e. rincian Penanaman Modal yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan yang meliputi:
    1. nomor induk berusaha dan tanggal diterbitkannya nomor induk berusaha;
    2. tanggal izin prinsip, izin Penanaman Modal, pendaftaran Penanaman Modal, atau Perizinan Berusaha
    3. lokasi usaha;
    4. rencana nilai Penanaman Modal dan rincian;
    5. bidang usaha;
    6. Kegiatan Usaha Utama;
    7. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
    8. jenis produksi; da
    9. cakupan produk;
f. saat mulai berlakunya dan berakhirnya fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di KEK;
g. ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan;
h. kondisi tertentu lainnya yang hams dipenuhi antara lain pemenuhan pembukuan terpisah atas Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas dengan Penanaman Modal yang telah mendapatkan fasilitas atau yang tidak mendapatkan fasilitas; dan
i. ketentuan pencabutan, pengenaan sanksi administratif, dan/atau penyesuaian fasilitas.

(6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk fasilitas Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
a. nomor dan tanggal keputusan mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan;
b. identitas Pelaku Usaha meliputi:
    1. nama Pelaku Usaha;
    2. Nomor Pokok Wajib Pajak Pelaku Usaha; dan alamat Pelaku Usaha;
c. rincian fasilitas Pajak Penghasilan yang diberikan;
d. rincian Penanaman Modal yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan meliputi:
    1. nomor induk berusaha dan tanggal diterbitkannya nomor induk berusaha; tanggal izin prinsip, izin Penanaman Modal, pendaftaran Penanaman Modal, atau Perizinan Berusaha;
    2. lokasi usaha atau proyek yang diajukan fasilitas;
    3. perincian rencana nilai Penanaman Modal; bidang usaha;
    4. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
    5. cakupan produk;
e. saat mulai berlaku dan berakhirnya fasilitas Pajak Penghasilan;
f. ketentuan larangan:
    1. Aktiva Tetap Berwujud yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan dilarang digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas atau dialihkan, kecuali diganti dengan aktiva berwujud lainnya; dan
    2. Aktiva Tak Berwujud yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan dilarang digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas atau dialihkan, kecuali diganti dengan aktiva tak berwujud lainnya;
g. ketentuan kewajiban:
    1. kewajiban pelaporan realisasi Penanaman Modal dan realisasi produksi; dan
    2. kewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum melakukan penggantian Aktiva Tetap Berwujud yang memperoleh fasilitas; dan
h. ketentuan pencabutan fasilitas Pajak Penghasilan yang telah diberikan dan pengenaan sanksi administratif.

(7) Pelaksanaan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan di KEK yang dilaksanakan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan per triwulan.

(8) Pemberian keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

5. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut atas:
a. penyerahan Barang Kena Pajak Berwujud tertentu dari TLDDP, kawasan bebas, dan TPB kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha;
b. impor Barang Kena Pajak Berwujud tertentu ke KEK oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha;
c. impor barang konsumsi ke KEK Pariwisata oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha;
d. penyerahan Barang Kena Pajak Berwujud tertentu antar Badan Usaha, antar Pelaku Usaha, atau antar Badan Usaha dengan Pelaku Usaha;

e. penyerahan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud termasuk jasa persewaan tanah dan/atau bangunan di KEK oleh Pelaku Usaha dan/atau Badan Usaha kepada Pelaku Usaha lainnya dan/atau Badan Usaha di KEK yang sama atau KEK lainnya;
f. penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu dan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha dari TLDDP atau selain TLDDP kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha; dan
g. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam KEK oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha.

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah, ketentuan ayat (3) Pasal 23 dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Barang Kena Pajak Berwujud tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf a, huruf b, dan huruf d berupa:
    a. barang modal termasuk tanah dan/atau bangunan, peralatan/mesin dan suku cadang yang diperlukan untuk proses produksi pengolahan, barang modal termasuk tanah dan/atau bangunan yang diperlukan untuk Pembangunan dan/atau Pengembangan KEK sesuai dengan bidang usahanya;
    b. bahan baku, bahan pembantu, dan barang lain yang diolah, dirakit dan/atau dipasang pada barang lain untuk kegiatan manufaktur, logistik, dan/atau penelitian dan pengembangan;
    c. bahan baku, bahan pembantu, peralatan dan barang lain yang diperlukan bagi kegiatan yang menghasilkan jasa kena pajak dan/atau kegiatan pengembangan teknologi; dan/atau
    d. barang yang diperuntukkan bagi kegiatan penyimpanan, perakitan, penyortiran, pengepakan, pendistribusian, perbaikan, dan perekondisian permesinan yang digunakan bidang usaha industri manufaktur dan logistik, serta perbaikan dan perawatan (maintenance, repair and overhaul) untuk kapal dan pesawat terbang.
(2) Jasa Kena Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf f diberikan sesuai bidang usahanya berupa:
    a. jasa maklon;
    b. jasa perbaikan dan perawatan termasuk maintenance, repair and overhaul (MRO) untuk kapal dan pesawat terbang;
    c. jasa pengurusan transportasi terkait barang untuk tujuan ekspor;
    d. jasa konstruksi yang meliputi perencanaan, perancangan, pelaksanaan Pembangunan, dan pengawasan Pembangunan di KEK, termasuk konsultansi konstruksi yang meliputi pengkajian, perencanaan, dan perancangan konstruksi;
    e. jasa teknologi dan informasi;
    f. jasa penelitian dan pengembangan;
    g. jasa persewaan alat angkut berupa persewaan pesawat udara dan/atau kapal laut untuk kegiatan penerbangan atau pelayaran internasional;
    h. jasa konsultansi bisnis dan manajemen, jasa konsultansi hukum, jasa konsultansi desain arsitektur dan interior, jasa konsultansi sumber daya manusia, jasa konsultansi keinsinyuran, jasa konsultansi pemasaran, jasa akuntansi atau pembukuan, jasa audit laporan keuangan, dan jasa perpajakan;
    i. jasa perdagangan berupa jasa mencarikan penjual barang di dalam Daerah Pabean untuk tujuan ekspor;
    j. jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan/atau komunikasi/konektivitas data; dan
    k. jasa lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(3) Dihapus.
(4) Barang konsumsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf c meliputi:
    a. Barang Konsumsi yang diperlukan oleh Pelaku Usaha di KEK Pariwisata sebagai bahan baku usaha untuk menghasilkan jasa;
    b. waktu penggunaannya relatif singkat serta akan hilang keberadaan dan/atau fungsinya bila sudah dipergunakan, yang digunakan dalam proses produksi yang menghasilkan jasa; dan
    c. tidak ditujukan untuk penggunaan di luar KEK.

7. Ketentuan Pasal 27 ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Dalam hal Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berasal dari luar Daerah Pabean, Pelaku Usaha wajib melunasi Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang pada saat impor atau pemanfaatannya tidak dipungut.
(2) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang wajib dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan Harga Jual dan/atau Penggantian pada saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari KEK ke TLDDP.
(3) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilunasi

paling lambat pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak atau pengeluaran Barang Kena Pajak dari KEK.

(4) Saat pengeluaran Barang Kena Pajak dari KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan tanggal persetujuan pengeluaran barang dalam dokumen kepabeanan.

(5) Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas:
   a. impor Barang Kena Pajak, dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
   b. pemanfaatan Jasa Kena Pajak, dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Surat Setoran Pajak.

(6) Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, diisi dengan mencantumkan keterangan berupa Kode Akun Pajak 411212 (Pajak Pertambahan Nilai Impor) dan Kode Jenis Setoran 121 (pembayaran PPN Impor yang semula mendapatkan fasilitas).

(7) Dihapus.

8. Ketentuan Pasal 28 ayat (7) dihapus, sehingga sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Dalam hal Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berasal dari TLDDP, Kawasan Bebas, dan/atau TPB, Pelaku Usaha wajib melunasi Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang pada saat perolehannya tidak dipungut.

(2) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang wajib dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan Harga Jual dan/atau Penggantian pada saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari KEK ke TLDDP.

(3) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilunasi paling lambat pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak atau pengeluaran Barang Kena Pajak dari KEK

(4) Saat pengeluaran barang dari KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan tanggal persetujuan pengeluaran barang dalam dokumen kepabeanan.

(5) Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan surat setoran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Surat Setoran Pajak.

(6) Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diisi dengan mencantumkan keterangan berupa Kode Akun Pajak 411211 (Pajak Pertambahan Nilai dalam negeri) dan Kode Jenis Setoran 121 (pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas).

(7) Dihapus.

9. Ketentuan Pasal 35 ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Pelaku Usaha yang melakukan pengeluaran barang yang bukan merupakan penyerahan Barang Kena Pajak ke TLDDP, wajib melunasi Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang terkait dengan Barang Kena Pajak yang dikeluarkan yang pada saat impor, pemanfaatan, atau penyerahannya tidak dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

(2) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang wajib dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Harga Jual, Penggantian, atau Nilai Impor pada saat pemasukan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak ke KEK.

(3) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilunasi paling lambat pada saat pengeluaran Barang Kena Pajak dari KEK.

(4) Saat pengeluaran barang dari KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tanggal persetujuan pengeluaran barang dalam dokumen kepabeanan.

(5) Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal Barang Kena Pajak:
   a. berasal dari TLDDP, KEK, TPB, atau Kawasan Bebas, dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Surat Setoran Pajak; atau
   b. berasal dari luar Daerah Pabean, dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pabean,

Cukai, dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(6) Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, diisi dengan mencantumkan keterangan berupa:

a. dalam hal barang berasal dari luar Daerah Pabean, Kode Akun Pajak 411212 (Pajak Pertambahan Nilai impor) dan Kode Jenis Setoran 121 (pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas); atau

b. dalam hal barang berasal dari TLDDP, Kode Akun Pajak 411211 (Pajak Pertambahan Nilai dalam negeri) dan Kode Jenis Setoran 121 (pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas).

(7) Dihapus.

10. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 35A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

(1) Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak, SSPCP, dan/atau bukti pungutan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5), Pasal 28 ayat (5), dan Pasal 35 ayat (5) yang dilampiri dengan:

a. Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran Barang Kena Pajak;

b. invoice atau kontrak, untuk penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan tanpa melalui mekanisme pengeluaran Barang Kena Pajak; atau

c. invoice atau kontrak, untuk penyerahan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak tidak berwujud, merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

(2) PPKEK yang dilampiri dengan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak, SSPCP, dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PPKEK tersebut, atas impor Barang Kena Pajak ke KEK yang tidak diberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

(3) Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, kepabeanan dan/atau cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

KEGIATAN BPD GINSI JATENG PERIODE MEI 2021

1. DISKUSI JAMINAN DAN REPAIR KONTAINER

Diskusi ini diadakan secara daring melalui zoom meeting pada hari Kamis, 6 Mei 2021 pada pukul 09.00 WIB.

Dalam diskusi ini membahas mengenai apa saja jaminan untuk container yang rusak.



